

Tinjauan Terhadap Bantuan Komisi Eropa di Timor-Leste

Komisi Eropa didirikan setelah Perang Dunia Kedua (PD II) pada tahun 1952. Keanggotaan Komisi Eropa diawali dengan enam negara yakni; Belgia, German, Perancis, Italia, Belanda dan Luxemburg. Namun karena perkembangannya dari tahun ke tahun Komisi Eropa kini beranggotakan 25 negara meliputi hampir seluruh kawasan Eropa. Salah satu alasan mendasar didirikannya Komisi Eropa dikarenakan pengalaman pahit yang dialami di Eropa pada awal abad 20 selama perang dunia (PD I dan PD II).

Sejak tahun 1999 Komisi Eropa merupakan salah satu donor multilateral bagi Timor-Leste. Sejak Awal pembentukan UNAMET komisi ini telah menyalurkan bantuannya. Bantuan Komisi Eropa disalurkan melalui misi PBB untuk kebutuhan bantuan darurat, bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan bantuan jangka panjang.

Bantuan Komisi Eropa dalam jangka pendek bertujuan membantu Timor-Leste dalam mengatasi berbagai persoalan, seperti sarana dan prasarana, memperbaiki sistem administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Sementara bantuan Komisi Eropa untuk jangka panjang, bertujuan untuk memenuhi dan mencapai target global untuk mengatasi kemiskinan yang tersirat dalam Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDG*).

Pertanyaan yang timbul adalah ; 1). Apa prinsip utama bantuan-bantuan Komisi Eropa? Sektor apa saja yang didanai oleh Komisi Eropa di Timor-Leste? Institusi mana saja yang menjadi implementator untuk bantuan-bantuan Uni

Eropa? Bagaimana mengimplementasikannya? Sejauh mana dampak dari bantuan tersebut terhadap kondisi di Timor-Leste?

Setelah melalui suatu proses penelitian yang panjang, akhirnya LH menurunkan artikel ini. Buletin *La'o Hamutuk* edisi ini mengkaji secara kritis bantuan Komisi Eropa untuk Timor-Leste.

Prinsip Bantuan Komisi Eropa

Komisi Eropa merupakan salah satu donor penting untuk masalah krisis kemanusiaan. Setiap tahunnya, Uni Eropa memberikan 0.3% Pendapatan nasional (*Gross National Income/GNI*) kepada negara-negara dunia ketiga dalam berbagai bentuk. Seiring dengan gencarnya kampanye global anti kemiskinan, kalangan masyarakat sipil menuntut agar Komisi Eropa meningkatkan prosentase bantuannya menjadi 0.7% dari GNI.

Bantuan Komisi Eropa diberikan dalam bentuk bantuan darurat, bantuan pembangunan dan juga bantuan ekonomi. Secara keseluruhan, Komisi Eropa (termasuk negara-negara anggota) mengkontribusikan sekitar 45% dari total keseluruhan bantuan kepada negara-negara berkembang. Total ini melebihi Amerika Serikat yang hanya memberikan 20%.

Menurut pihak Uni Eropa, bantuan pembangunan yang diberikan merupakan solidaritas dari komunitas Eropa dengan negara-negara yang lemah ekonominya dan untuk menjamin hubungan dagang yang baik dengan Komisi Eropa.

(Bersambung ke halaman 2)



Daftar Isi . . .

Tinjauan Terhadap bantuan Komisi Eropa di Timor Leste.....	1
Laporan tiga bulan pertama tentang dana perminyakan.....	9
Kampanye 16 hari kekerasan.....	10
Berita singka : Peluncuran Buku.....	12
Berita Singkat : Statment dari ANTI.....	14
Editorial : Tragedi yang terlupakan.....	16

Secara legal prinsip Bantuan Komisi dijelaskan dalam artikel 177 perjanjian Komisi Eropa menyangkut kebijakan komunitas dalam bidang kerjasama pembangunan untuk saling mengimbangi dengan kebijakan anggota negara untuk membantu perkembangan, menopang ekonomi dan pembangunan sosial di negara-negara berkembang; kelancaran dan tahapan perpaduan pengembangan negara-negara sedang berkembang ke dalam ekonomi dunia; mengurangi angka kemiskinan. *Art 177 of the EC Treaty specifies that Community policy in the sphere of development co-operation is complementary to the policy pursued by Member States and must foster: the sustainable economic and social development of developing countries; the smooth and gradual integration of developing countries into the world economy; and the reduction of poverty.* Dalam hal kebijakan, didasarkan pada pernyataan bersama yang ditanda tangani pada tanggal 26 April 2000 yang kemudian dikenal dengan Kebijakan Pembangunan Komunitas Eropa (*The European Community Development Policy*).

Dalam konstitusi Komisi Eropa artikel III-316 menjelaskan bahwa tujuan dari kerjasama pembangunan adalah untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Negara anggota harus berkomitmen dan bertanggung jawab atas tujuan yang telah disahkan dalam konteks PBB dan komponen organisasi internasional lainnya.

Artikel III-292 menjelaskan bahwa Komisi Eropa harus mendefinisikan kebijakan bersama dan tindakannya bekerja untuk tujuan yang tinggi dalam kerjasama di semua sektor kerjasama internasional agar memperkuat pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan di negara-negara sedang berkembang dengan tujuan utamanya adalah mengurangi kemiskinan.

Seiring dengan dicetuskannya Tujuan Pembangunan Millenium, Komisi Eropa dan negara-negara anggota berkomitmen untuk mempercepat tujuan yang telah ditentukan untuk tahun 2015. Sebuah deklarasi yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota pada tahun 2004 menegaskan bahwa "Komisi Eropa harus melanjutkan dan memainkan peranan penting untuk melawan kemiskinan secara global. Dewan Eropa mengekspresikan perhatiannya untuk mencapai MDG, khususnya di kawasan Afrika". Ini menunjukkan bahwa Komisi Eropa akan mengintensifkan usahanya untuk memenuhi komitmennya dalam moneter, termasuk melalui eksplorasi sumber pendapatan keuangan dan akan mendukung secara kuat usaha PBB untuk mencapai tujuan.

Melalui Deklarasi Barcelona juga yang ditandatangani pada bulan maret 2002, Komisi Eropa telah berkomitmen untuk meningkatkan bantuannya dari 0.3% menjadi 0.7% dari pendapatan nasionalnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh PBB. Komitmen

lainnya adalah reformasi dalam sistem Moneter Internasional, termasuk di dalamnya isu tentang utang negara-negara berkembang.

Langkah lain yang diambil adalah meminta para mitra untuk mengambil bagian dalam Kesepakatan Cotonou (*Cotonou Agreement*). Kesepakatan ini meliputi beberapa dimensi yaitu aspek politik (dialog politik, kebijakan perdamaian, prevensi konflik dan resolusi perdamaian, masalah HAM dan good Governance), pendekatan partisipatif (memberikan ruang agar aktor non-negara ikut berperan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pembangunan), *Stronger bias to Reduce Poverty* (fokus pada pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, kerjasama dan integrasi regional, isu-isu thematic dan cross cutting (lingkungan, kesteraan gender, pembangunan institusional dan pengembangan sumber daya manusia), Kerangka baru dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan dan reformasi kerjasama keuangan.

Komisi Eropa di Timor Leste

Komisi Eropa mulai memberikan bantuan kepada Timor Leste setelah PBB mendirikan misi pertamanya di TL, Unamet pada tahun 1999. Dana sebesar 5.2 juta USD di berikan kepada Untaet untuk menyukseskan misinya. Memasuki masa kemerdekaan, Komisi Eropa terlibat secara aktif dalam memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada Timor Leste. Total bantuan yang diberikan antara tahun 1999-2004, sebesar 181.2413 Juta USD. Disamping itu, *European Comission for Humanitarian Office* (ECHO) juga memberikan 2.5 juta USD untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan melalui berbagai NGO yang bergerak di bidang makanan. Dan menurut rencana, Komisi Eropa akan memberikan dana sebesar 11.25 juta USD.

Bantuan-bantuan yang diberikan dengan tujuan untuk mendukung sektor-sektor sebagai berikut :

1. Dukungan untuk Misi PBB

Bantuan ini diberikan pada dua misi PBB, Unamet dan Untaet. Total bantuan yang diberikan sebesar 14.4 juta. Dimana 5.2 juta USD diberikan untuk mendukung misi Unamet dan 9.2 juta USD diberikan untuk mendukung misi Untaet.

2. Bantuan Darurat dan Kemanusiaan.

Bantuan ini diberikan sebagai respons terhadap kejadian dan kehancuran total yang diakibatkan oleh tindakan milisi pro-Jakarta. Bantuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Timor Leste pada pasca kehancuran tahun 1999. Komisi Eropa memberikan bantuan ini dalam bentuk bantuan darurat dan kemanusiaan yang dicairkan melalui PBB dan beberapa NGO. Total bantuan sebesar 48.8 Juta USD.

Dengarkan Program Radio "I qualidade" La'ó Hamutuk

Wawancara dan Komentar mengenai isu-isu yang kami pantau!

Dalam Bahasa Tetum dan Indonesia

Setiap Hari Minggu, pukul 1:00 siang di Radio Timor Leste

3. Bantuan Rekonstruksi Nasional.

Bantuan ini bertujuan untuk membantu Timor Leste dalam membangun kembali sarana infrastruktur dan menciptakan sistem Administrasi Publik Timor Leste untuk fondasi pembangunan jangka panjang. Bantuan ini diberikan sejak tahun 2000-2002 dengan total dana 54. 6671 Juta.

4. Bantuan Jangka Panjang

Bantuan jangka panjang difokuskan pada dua sektor utama, yaitu Sektor kesehatan dan Pembangunan Area Pedesaan. Untuk sektor kesehatan, bantuan ini telah berlangsung sejak tahun 2002 dan akan berakhir pada tahun 2006 mendatang. Total dana yang diberikan berjumlah 15.675 juta USD dan dicairkan melalui Bank Dunia dalam paket Trust Fund for East Timor (TFET).

Alasan utama bagi Komisi Eropa untuk memberikan prioritas terhadap sektor ini diidasi pada kenyataan bahwa pelayanan kesehatan di area pedesaan sangat rendah atau masih dibawah standar. Selain itu, sumber daya manusia yang sangat rendah, jarak antara pusat pelayanan kesehatan dan tempat tinggal masyarakat yang sangat jauh, menjadi beberapa alasan bagi Komisi Eropa untuk mendukung sektor ini. Dengan demikian tujuan utamanya adalah mendesentralisasikan sistem pelayanan kesehatan sehingga mempermudah akses kepada masyarakat pada pelayanan kesehatan. Dukungan lain dalam sektor kesehatan adalah Pengimplementasian *Sectoral Investment Programme (SIP)* yang bertujuan untuk memberikan otonomisasi kepada pusat pelayanan kesehatan, membuka akademi perawatan, dan lainnya. Untuk program ini, Komisi Eropa langsung mencairkan dana sebesar 9.92 Juta USD melalui Bank Dunia dan ECHO .

Selain sektor kesehatan, Komisi Eropa memberikan bantuan pada sektor pembangunan pedesaan. Bantuan ini didasari pada kenyataan hidup masyarakat yang berdomisili di wilayah pedesaan dan terisolasi. Tujuan utama dari sektor ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan. Total dana yang dialokasikan pada sektor ini sebesar 27.6 juta USD untuk tahun 2002-2006. Pembangunan area pedesaan akan tetap menjadi salah satu sektor penting untuk rencana masa depan, karena Komisi Eropa telah sepakat untuk kembali memberikan 11.25 juta USD untuk sektor ini, dan pengimplemetasiannya akan dimulai tahun depan. Untuk tahun 2002-2006, ada 6 program yang diimplementasikan. (Lebih jelas lihat tabel di sebelah ini).

Untuk tahun depan, Program Pembangunan Pedesaan akan difokuskan pada usaha untuk mengatasi kelaparan dengan meningkatkan keamanan makanan, pengembangan peternakan untuk penduduk miskin di daerah pedesaan, terutama di kawasan barat, yang meliputi Maliana, Suai dan Oecusse. Keputusan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Timor Leste merupakan salah satu negara dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Asia dan tidak memiliki kenyamanan makanan yang cukup. Oleh karena itu, Komisi

Eropa telah berkomitmen untuk mencairkan dana sebesar 11.25 juta USD guna membangun wilayah pedesaan.

No	Deskripsi Bantuan	Total (US\$)
1	Dukungan terhadap misi Unamet	5.2 juta
2	Dukungan terhadap Misi Untaet	9.2 juta
3	Bantuan Darurat melalui NGO	35.4 juta
4	Bantuan Darurat melalui UN	3.4 juta
5	Dukungan terhadap TFET	50.9 juta
6	Dukungan terhadap Pemilihan MK dan Presiden melalui UNDP	1.4 juta
7	Dukungan terhadap Decentralisasi sistem kesehatan melalui Bank Dunia	15.7 juta
8	Dukungan terhadap pengembangan kapasitas melalui UNDP	2.4 juta
9	Dukungan terhadap Program Pembangunan Rural melalui UN, IOM dan Bank Dunia	27.6 juta
10	Dukungan terhadap Implementasi SIP di sektor kesehatan melalui EC dan Bank Dunia	9.9 juta
11	Dukungan terhadap Penduduk Rawan melalui NGO	4.6 juta
12	Dukungan terhadap Pemilihan Suku melalui UNDP	0.4 juta
13	Dukungan melalui NGO	4.0 juta
14	Program Pembangunan Rural Tahap II	11.2 juta
	Total	92.5 juta

Partner Bantuan Komisi Eropa

Ada beberapa organisasi yang menjadi mitra untuk mengimplementasikan berbagai program yang didanai oleh Komisi Eropa. Diantaranya Bank Dunia, Agen-Agen PBB, NGO yang berbasiskan di Eropa. Jika dilihat secara keseluruhan mayoritas dana dari Komisi Eropa disalurkan melalui Bank Dunia dengan prosentase 46%, sementara agen PBB dengan prosentase 26% sisanya melalui organisasi terkait lainnya.

Menurut pihak Komisi Eropa ada beberapa alasan mengapa mereka tidak mencairkan dana melalui Pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan Komisi Eropa sendiri di kawasan Asia merupakan *Pre-kondisi* dukungan keuangan berupa dana hibah, sistem pemberian dana, dan pemberian dana untuk jangka menengah bagi setiap kementerian.

Trust Fund for East Timor (TFET) – Bank Dunia

Bank Dunia merupakan salah satu mitra global yang dinilai sangat efektif. Seiring dengan agenda global mengenai pemberantasan kemiskinan, Komisi Eropa mendukung Dokumen Strategi Penurunan Kemiskinan, *Poverty Reduction Strategy Papers (SRSP)*. Bank Dunia di Timor Leste mendapatkan kepercayaan untuk mengatur dana TFET, bersama Bank Pembangunan Asia (ADB).

Antara tahun 2000-2002, Komisi Eropa mencairkan 50.8576 Juta USD untuk program-program yang dikelola dan diimplementasikan oleh Bank Dunia. Jika diprosentasikan, maka 46% dari bantuan Komisi Eropa diberikan melalui Bank Dunia. Dan jika ditambah dengan bantuan bi-

Siapakah di La'õ Hamutuk?

Staf La'õ Hamutuk: Ines Martins, Yasinta Lujina, Maria Afonso, Guteriano Nicolau, Alex Grainger, Santana Soares, Bella Galhos, Charles Scheiner

Dewan Penasihat: Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, Pamela Sexton, Aderito de Jesus Soares

Penerjemah Buletin Edisi ini: Selma Hayati, Kylie Talo, Nino Sari, Joao Sarmento

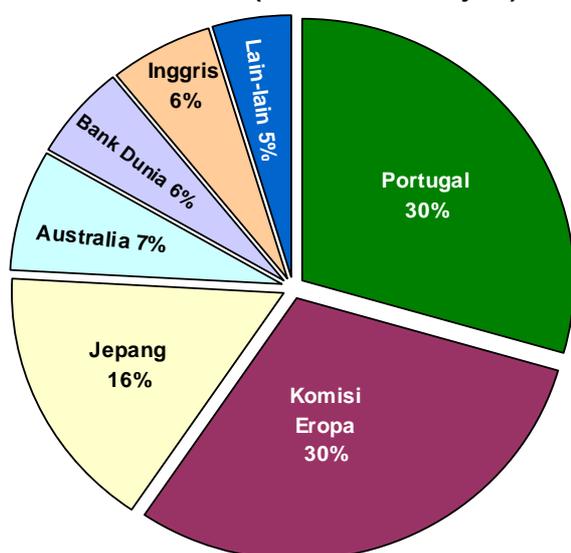
Foto Buletin Edisi ini: Dokumentasi dari ANTI, Dokumentasi SAHE

Gambar: Cipriano Daos

lateral lima negara anggota Komisi Eropa, maka 2/3 dari 177 juta dollar USD. Sementara 8 donor lainnya berkontribusi 1/3-nya. Dana TFET ini digunakan untuk mendanai program-program seperti CEP, Program Rehabilitasi Pertanian dan program lainnya.

Menurut pihak Komisi Eropa, alasan mendasar pihaknya memilih Bank Dunia sebagai mitra untuk mengimplementasikan program secara efisiensi dan efektivitas koordinasi antara negara donor dan ketrampilan teknis. Alasan politisnya bahwa aturan TFET menggunakan prinsip satu suara per dollar (*One vote per dollar*), sehingga jika ditambah dengan lima negara tersebut, Komisi Eropa akan mendominasi karena memiliki suara yang banyak dan bisa mempengaruhi keputusan-keputusan penting. Sejak kemerdekaan Timor Leste, Komisi Eropa merupakan satu-satunya donor untuk program kesehatan dan pertanian melalui dana TFET.

Dukungan negara-negara donor kepada TL melalui TFET (Total US\$169.5 juta)



Bagi pihak Uni Eropa, Bank Dunia telah berhasil dalam menjalankan misinya di Timor Leste. Berdasarkan laporan tim evaluasi beberapa waktu lalu, bahwa TFET telah menjadi salah satu instrumen yang berhasil dalam proses rekonstruksi Timor Leste. Pelaksananya memuaskan dan memenuhi harapan yang diinginkan oleh pihak Uni Eropa. Alasan ini didasarkan pada kriteria bahwa ada koordinasi baik antara donor, keberhasilan dalam memobilisasi sumber dana untuk rekonstruksi Timor Leste dan berhasil dalam proses implementasi program.

Dukungan sektoral ini meliputi kebijakan, mekanisme koordinasi dan kerangka penggunaan dana. Kepercayaan yang diberikan oleh pihak Komisi Eropa ini juga dibenarkan oleh Elisabeth Huybens dari Bank Dunia. Dalam hal koordinasi, pihak Komisi Eropa bertindak sebagai donor dan Bank Dunia bertindak sebagai implementator. Dimana Program dirancang oleh Bank Dunia dan diajukan kepada Komisi Eropa untuk meminta dukungan keuangan.

Agen-Agen PBB

Selain Bank Dunia, Komisi Eropa juga menggunakan Agen-agen PBB sebagai mitra dalam mengimplementasikan

program-program mereka. Semenjak masa darurat, Agen PBB seperti World Food Program (WFP) mendapatkan kepercayaan untuk mengimplementasikan bantuan darurat dan kemanusiaan, UNHCR mendapatkan kepercayaan untuk mengimplementasikan program repatriasi dan pemulangan pengungsi. Alasan utama menyalurkan dana melalui Agen PBB adalah suatu wujud dukungan yang diberikan oleh Komisi Eropa kepada PBB dalam proses misi transisinya menuju kemerdekaan.

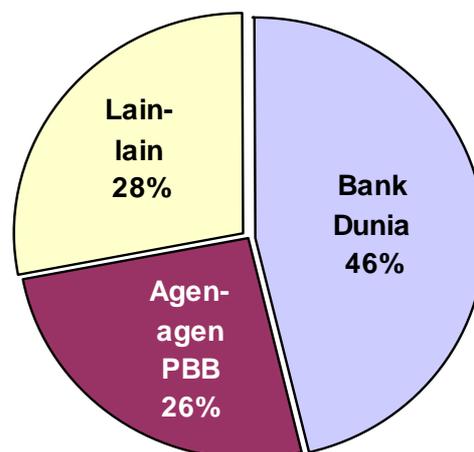
Selama masa rekonstruksi, agen-agen PBB tetap memainkan peranan penting dalam mengimplementasikan program-program Komisi Eropa. UNDP tetap dipercayakan untuk mengimplementasikan program pengembangan kapasitas selama masa Unmiset, termasuk dukungan terhadap administrasi publik (Baca Bulletin La'o Hamutuk, Vol.VI, No.3). Kini, UNDP masih mengimplementasikan program seperti Program Pengembangan Kapasitas Komunitas Oecusse, dan program pembangunan pedesaan.

Secara keseluruhan 26% dari bantuan Komisi Eropa dicairkan melalui Agen-agen PBB. UNDP merupakan agen PBB yang berperan aktif dalam pelaksanaan program seperti; OECAP, program pendidikan kewarganegaraan, dan lainnya. Selain UNDP, Co-Implementator untuk program pembangunan pedesaan melibatkan; *International Labour Organization (ILO)*, *United Nations Development Fund for Women (Unifem)*, *International Organization for Migration (IOM)*, dan juga *United Nations Organization for Project Services (UNOPS)*. Dari keseluruhan Bantuan Komisi Eropa, Agen-agen PBB mendapat jatah 26%.

NGO-NGO Eropa

Beberapa NGO Eropa merupakan aktor penting dalam pelaksanaan bantuan Uni Eropa. Statistik global menunjukkan bahwa antara tahun 2001-2003, lebih dari setengah bantuan Uni Eropa diimplementasikan oleh NGO-NGO Eropa. Di Timor Leste, eksistensi para NGO Eropa telah memainkan peran penting dalam pengimplementasian bantuan Uni Eropa.

Sejak masa darurat, NGO seperti *Medicines Sans Frontieres (MSF)* dan *Asociacao Medicina Internacional (AMI)* bergerak dalam mengimplementasikan bantuan darurat, terutama di sektor kesehatan. Sampai sekarang, beberapa NGO seperti; Care, Advocat Sem Frontieras (ASF) berperan dalam pengimplementasian bantuan Uni Eropa.



Mengapa Begitu Banyak Bantuan dari Komisi Eropa?

Kebijakan Komisi Eropa untuk bantuan Luar negeri Komisi Eropa terhadap Timor Leste didasarkan pada perjanjian Komisi Eropa, artikel 177. Kebijakan merupakan pernyataan bersama yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2000 dan selanjutnya dikenal dengan *The European Community Development Policy* atau Kebijakan Pembangunan Komunitas Eropa.

Atas dasar ini, Komisi Eropa membuat sebuah *Country Strategy Paper (CSP)*, *strategi dokumen negara*. Dalam CSP dijelaskan tujuan utamanya adalah memperkuat kerangka kerjasama dan mengefektifkan kontribusi melalui dialog institusional, kerjasama ekonomi dan keuangan, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, stabilitas ekonomi dan sosial serta demokrasi.

Empat tujuan Uni Eropa dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun, keempat tujuan sebagai berikut:

1. Melengkapi program rehabilitasi di Timor Leste dan mengakhiri commitment yang diberikan pada 2002-2003.
2. Menciptakan program pembangunan jangka panjang, khususnya untuk sektor kesehatan dan pembangunan pedesaan.
3. Mempertahankan posisi Komisi sebagai mitra untuk Timor Leste dan memastikan visi bantuan komunitas.
4. Membantu Timor Leste mengembangkan strategi untuk perdagangan luar negeri dan hubungan ekonomi.

Berdasarkan *CSP*, Komisi Eropa kelihatan memiliki ekspektasi yang tinggi untuk masa depan Timor Leste dan melihat bahwa sektor pertanian akan menjadi salah satu sektor yang penting. Di sisi lain dalam jangka waktu menengah kelihatan bahwa isu-isu seperti kemiskinan, masalah *Capacity dan Public Administration, Good Governance dan HAM* menjadi berbagai persoalan.

Pijakan pada realitas ini, maka Komisi Eropa memfokuskan bantuannya pada sektor kesehatan dan pembangunan pedesaan selain sektor pertanian yang didanai melalui Bank Dunia. Di masa depan, Timor Leste juga akan menandatangani Kesepakatan Cotonou yang merupakan jalan menuju liberalisasi perdagangan antara kedua negara. Pada tingkat tinggi, telah ada diskusi antara Perdana Menteri Timor Leste dan delegasinya dengan presiden Komisi Eropa ketika berkunjung ke Bruxeles, Belgia. Diskusi ini memfokuskan pada periode transisi.

Isu perdagangan bebas juga difokuskan oleh Uni Eropa untuk Timor Leste. Hal ini diakui oleh Guiglemo Comlobo, eks Perwakilan ECHO di Dili. Meskipun Ia berpendapat bahwa perdagangan bebas lebih adil, dengan alasan pasar bebas sudah tidak bisa ditolak lagi. Jika Timor Leste menandatangani kesepakatan ini, aspek positifnya bahwa Timor Leste akan memperoleh bantuan dari Uni Eropa, termasuk bantuan keuangan dari European Bank. Tetapi secara ekonomis, Timor Leste juga harus meliberalisasi sektor perdagangan dan keuangannya. Dan hal ini dilakukan dengan mengakhiri *Non-reciprocal preferences*. Agenda integrasi ekonomi yang merupakan salah satu kondisi indikasi dalam pasar bebas juga diutamakan, dimana pihak Komisi Eropa menekankan agar Timor Leste dapat mengintegrasikan ekonominya baik secara regional maupun global.

Analisis dan Pandangan La'o Hamutuk

Dengan memperhatikan berbagai data tersebut, adalah baik Timor Leste memperoleh bantuan dari Komisi Eropa, di tengah kampanye global untuk pemberantasan kemiskinan global dan target untuk MDG, dan sebagai salah satu negara termiskin di kawasan Asia, maka bantuan Komisi Eropa sangat dibutuhkan.

Pandangan secara global, komitmen Komisi Eropa untuk memberantas kemiskinan global lebih tinggi, dan berbagai langkah yang diambil menuju ke sana semakin mempertegas komitmen ini. La'o Hamutuk berpikir bahwa, pemberantasan kemiskinan harus menjadi tujuan utama dari bantuan-bantuan Komisi Eropa, serta negara-negara anggotanya. Komisi Eropa telah memberikan perhatian yang besar terhadap sektor pembangunan pedesaan dan sektor kesehatan sebagai prioritasnya untuk program kerjasama jangka panjang.

Di masa silam, terutama masa-masa perjuangan, posisi Komisi Eropa terhadap masalah Timor Leste lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh tekanan dari negara anggota seperti Portugal dan Irlandia. Bantuan Uni Eropa adalah tidak secara bilateral yang diimplementasikan oleh ECHO.

Namun menganalisis proses ini cara keseluruhan di Timor Leste, ada beberapa masalah yang menurut LH perlu diperhatikan seperti :

1. Konteks Pemberdayaan.

Bantuan Uni Eropa pada dasarnya untuk membantu Timor Leste mengatasi berbagai persoalan sosial yang sedang dihadapi saat ini . Secara langsung maupun tidak langsung, bantuan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Timor Leste dalam berbagai aspek, namun bila memperhatikan jalur pengimplementasian, bantuan-bantuan Komisi Eropa lebih banyak memberdayakan institusi-institusi internasional seperti IFI, Agen-agen PBB dan NGO-NGO yang berbasis di Eropa. Dan secara tidak langsung bantuan tersebut telah mensubordinasikan posisi Pemerintah RDTL dalam proses pengambilan keputusan. Secara ekonomis, bantuan ini akan kembali semua ke negara asal, karena digunakan untuk membayar staff internasional yang bekerja di institusi-institusi internasional tersebut

Beberapa staf di pemerintahan yang kami temui, mengakui bahwa fungsi mereka hanya sebagai koordinasi saja. Program desentralisasi kesehatan salah satu contohnya. Posisi kementerian kesehatan hanya sebagai implementator, sementara fungsi managerial dijalankan oleh Bank Dunia. Hal yang sama juga berlaku untuk program pemberdayaan yang dijalankan oleh Unifem bersama dengan kabinet Promosi Kesetaraan Gender. Fungsi Pemerintah dalam program ini hanyalah konsultasi dan mitra dalam pengambilan kebijakan, tetapi fungsi manajemen dijalankan oleh UNDP dan Unifem.

La'o Hamutuk melihat bahwa ini suatu kenyataan bahwa pihak Komisi Eropa kurang mempercayai Pemerintah RDTL. Seharusnya pemerintah diberikan kepercayaan maksimal untuk ikut memainkan perannya dalam mengimplementasikan semua program. Pemerintah tidak hanya memainkan fungsi konsultasi, tetapi juga eksekutor.

2. Agenda Pasar Bebas

Bantuan Komisi Eropa didasarkan pada *Country Strategy Paper/Dokumen strategi negara* untuk setiap negara dan setiap kawasan. Dengan *CSP* untuk Timor Leste dan

kawasan Asia Tenggara, aspek ekonomi, agenda pasar bebas sangat menyolok. Hal ini terefleksi dalam konteks jangka panjang untuk sektor ekonomi, yaitu kerjasama ekonomi dan perdagangan. Dalam Kesepakatan Cotonou yang sudah ditandatangani oleh ratusan negara, agenda ini terlihat jelas.

Jika Timor Leste menandatangani kesepakatan ini, maka Timor Leste akan masuk ke dalam agenda ini. Memang pihak Komisi Eropa mengakui bahwa persoalan pasar bebas sudah tidak bisa dihindari, dan yang bisa dilakukan adalah membuat pasar bebas itu lebih adil. Tetapi dalam kenyataan selama ini, pasar bebas tidak pernah menguntungkan negara-negara berkembang. Dan melihat keadaan Timor Leste sekarang, belum memenuhi standar untuk itu. Fakta historis di negara-negara berkembang yang menerapkan Agenda Pasar Bebas menunjukkan bahwa pasar bebas tidak membantu ekonomi mereka, tetapi justru membunuh pertumbuhan ekonomi mereka.

La'o Hamutuk melihat bahwa dalam Kesepakatan Cotonou, tidak ada fokus yang jelas terhadap isu pembangunan. Tetapi lebih kepada persoalan perdagangan bebas; di-mana Timor Leste akan melakukan perdagangan dengan Uni Eropa.

3. Bank Dunia dan Komisi Eropa

Bank Dunia merupakan mitra kerja Komisi Eropa baik secara global maupun di Timor Leste. Seperti yang dikatakan oleh pihak Komisi Eropa bahwa alasan utama mereka adalah mengkoordinir semua donor dan kebijakan mereka di Asia. Tetapi dengan memperhatikan pengalaman Bank Dunia di negara-negara berkembang dan di Timor Leste, institusi ini selalu menghadapi berbagai masalah.

Memang salah satu hal positif bahwa Komisi Eropa tidak mengimplementasikan secara langsung bantuannya di Timor Leste seperti yang dilakukan oleh negara donor lain. Tetapi proyek-proyek TFET yang mendapat dukungan besar dari Komisi Eropa pada umumnya bermasalah. Seperti CEP, program Agriculture Rehabilitation Project (ARP) I dan II dan program lainnya (Baca Bulletin La'o Hamutuk, Vol.1 No.4 Januari 2001).

4. Partisipasi

Jika Komisi Eropa berkomitmen untuk mengatasi kemiskinan, demokratisasi, good governance, maka salah satu faktor yang juga harus diperhitungkan adalah partisipasi masyarakat lokal. Sejauh ini, LH melihat bahwa partisipasi masyarakat lokal sangat kurang dalam berbagai program yang dirancang oleh Bank Dunia dan institusi internasional lainnya, untuk menentukan program yang mereka inginkan. Bahkan proses sosialisasi program dinilai kurang.

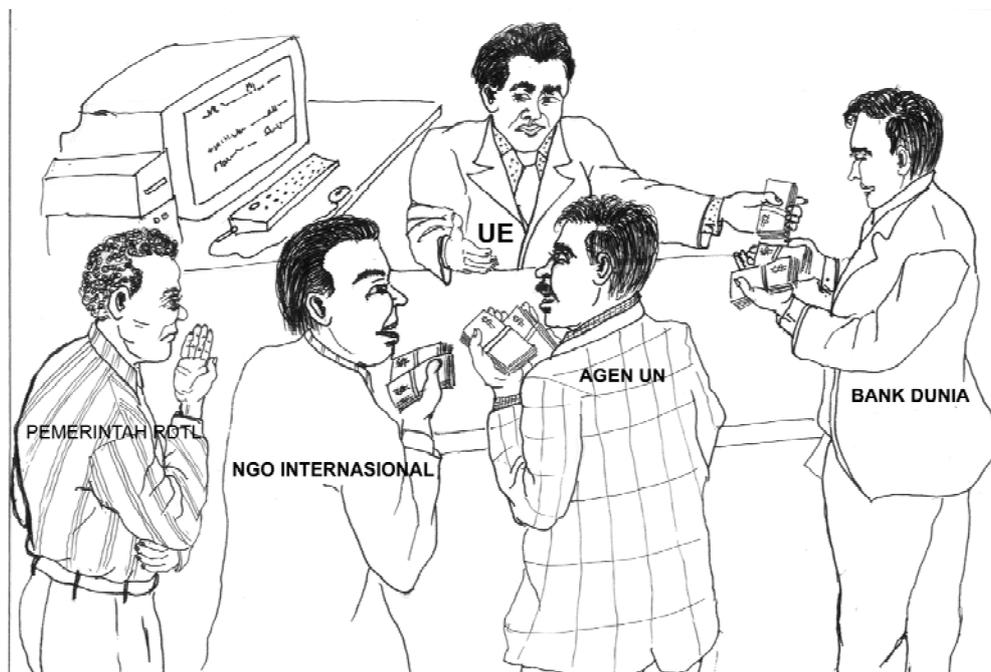
LH melihat bahwa ini adalah suatu bumerang untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Komisi Eropa dalam hal pemberantasan kemiskinan. Di satu sisi, dalam konteks kebijakan dan dasar legal, Komisi Eropa menekankan tentang pemberantasan kemiskinan, demokratisasi, good governance dan HAM, tetapi di sisi lain, konteks implementasi, prinsip-prinsip ini tidak memadai.

LH juga meminta kepada Komisi Eropa untuk tetap memainkan peran penting dalam isu keadilan di Timor Leste. LH mengakui bahwa Komisi Eropa telah menjadi salah satu aktor internasional selama perjuangan menuju kemerdekaan. Dan sekarang, peran Komisi Eropa masih dibutuhkan untuk masalah keadilan bagi korban kejahatan di TL.

Kesimpulan dan Penutup

Pandangan La'o Hamutuk terhadap bantuan di atas, La'o hamutuk melihat bahwa di dalam kampanye global pemberantasan kemiskinan ini, bantuan negara-negara industri maju penting demi mencapai target yang telah ditetapkan. Tetapi dengan meningkatkan jumlahnya saja, tidak cukup. Penting juga untuk melihat efektifitas dan efisiensi dalam pengimplementasian sangat penting demi mencapai target di atas.

Pandangan LH bukannya tidak menyetujui bantuan tersebut. Tetapi yang dikritisi adalah prosesnya. Kegagalan dalam proses tentu saja akan mempengaruhi tujuan yang diharapkan. Dan ini juga sebagai kontribusi dari LH sebagai anggota kelompok masyarakat sipil terhadap proses pembangunan di Timor Leste. ❖



Program Pembangunan Pedesaan

Rural Development Program (RDP) atau Program Pembangunan Pedesaan adalah salah satu sektor yang menjadi prioritas untuk bantuan-bantuan Komisi Eropa dalam jangka panjang. RDP I telah diimplementasikan sejak tahun 2002 dan akan berakhir pada tahun 2006. RDP pertama bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di area pedesaan; dengan total dana 24,450,225 juta Euro.

RDP I terdiri dari program-program seperti Oecusse Community Activation Project (OCAP), Pelatihan untuk meningkatkan kualitas Pekerja, program untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan nasional, ARP III dan program lain. Program-program di atas melibatkan Institusi Internasional seperti Agen-agen PBB dan Bank Dunia sebagai mitra utama. Sementara Pemerintah seperti Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penasehat Perdana Menteri untuk kesetaraan Gender menjalankan fungsi konsultatif. Lihat tabel di bawah ini.

Komisi Eropa juga telah bersedia untuk mengimplementasikan RDP II yang akan diimplementasikan mulai tahun 2006, dengan total dana 11.25 juta. RDP II akan difokuskan pada peningkatan keamanan makanan, *pengembangan peternakan* untuk komunitas di area pedesaan, khususnya di bagian Barat, di tiga Distrik yang menjadi perhatian yakni; Maliana, Suai dan Oecusse.

Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat kapasitas kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal manajemen dan Teknis, sehingga dapat meningkatkan akses untuk pasar dan pelayanan untuk membantu masyarakat miskin demi meningkatkan pendapatan mereka.

Hasil yang ingin dicapai dari program ini adalah;

1. Kementerian terkait memiliki kualifikasi untuk pendekatan sektoral/dukungan budget (dengan kebijakan yang tepat, erangka pengeluaran jangka menengah dan koordinasi antara donor yang efektif) dan hubungan kerja dengan pemerintah lokal secara jelas dan dapat mencapai mandatnya.

	Program	Implementator	Kontribusi Komisi Eropa	Durasi	Hasil
1	Program Pengembangan Komunitas di	UN Agencies	16,814,618	5	
1.1	Perbaikan terhadap Jaringan Pasar di bagian Timur	UNDP/ UNOPS	7,449,084	3	Memperbaiki akses ke pasar di wilayah timur sebagai proses untuk meningkatkan produksi pertanian di Viqueque dan Lautem.
1.2	Program Pengembangan Komunitas Oecusse	UNDP/ UNOPS	3,460,160	5	Memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan bagi penduduk di Distrik Oecusse berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan
1.3	Pelatihan Tenaga Kerja.	UNDP/ILO	5,255,623	5	Mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja melalui pengembangan kapasitas nasional dengan meningkatkan sistem pelatihan (berkontribusi untuk pengurangan kemiskinan dan memfasilitasi pembangunan ekonomi Timor Leste.
1.4	Program Pengembangan Kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	UNDP/ UNIFEM	649,750	3	Memperkuat hak-hak sipil kaum perempuan.
2	Bantuan untuk stabilitas komunitas di Timor Leste.	International Organisation for Migration (IOM)	3,068,518	2	Menyediakan akses kepada komunitas di area rural dengan tujuan untuk mempromosikan partisipasi dalam pembangunan dan meminimalisir arus urbanisasi.
	Program Rehabilitas Pertanian Tahap III	World Bank	7,745,619	4	Meningkatkan kemampuan Departemen pertanian, kehutanan dan perikanan dan partner pembangunan agar dapat membantu komunitas rural dalam meningkatkan produksi secara berkelanjutan.
Total kontribusi komisi Eropa			27,628,754		

2. Meningkatkan pelayanan dari Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan agar bekerja secara efisien dalam semua level sampai tingkat bawah dan dapat memenuhi kebutuhan petani terhadap informasi dan pelayanan pertanian.
3. Para Petani memiliki akses kepada pelayanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi Pertanian dan Kehutanan yang berkelanjutan.
4. Organisasi-organisasi komunitas di bagian barat diperkuat untuk memberikan dukungan.
5. Kebijakan kehutanan dan regulasi yang memberikan perlindungan, management kehutanan terhadap masyarakat lokal khususnya masyarakat miskin dengan ekonomi rendah
6. Meningkatkan akses dan infrastruktur di bagian barat. RDP II dirancang berdasarkan kondisi sosio-ekonomi masyarakat Timor Leste. Timor Leste adalah negara termiskin di kawasan Asia dengan kondisi kemiskinan yang luas, dimana 2/5 dari penduduk Timor Leste tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Sistem pertanian yang tradisional diakui tidak dapat menciptakan suatu sistem yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan menimbulkan kerusakan hutan dan air.

RDP II ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada Kementerian terkait dalam beberapa hal;

1. Memberikan dukungan untuk meningkatkan kualifikasi kementerian terkait dalam memenuhi Komisi Eropa Sector Approach/Budget Aid.
2. Memberikan dukungan kepada kementerian terkait demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat local agar dapat mengatasi kemiskinan khususnya kewanamanan makanan.
3. Memberikan dukungan kepada Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk mengimplementasikan SIP.
4. Memberikan dukungan untuk meningkatkan akses kepada jalan dan infrastruktur di area rural.

Program ini akan berlangsung selama lima tahun. Implementator hingga sekarang masih dalam tahap penyeleksian. Namun dua kementerian yang memiliki relasi kuat dengan program ini adalah Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sebagai mitra pemimpin dan Kementerian Pekerjaan Umum dibawah koordinasi Kementerian Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Demi memperlancar proses kerjasama antara Implementator, Donor (Komisi Eropa) dan Peme-rintah (Kementerian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum), maka akan dibentuk Sebuah Stering Committe (PSC). PSC akan bertanggung jawab dalam hal kebijakan dan memfasilitasi koordinasi antara semua institusi dan kelompok yang terlibat dalam program ini.

PSC akan mengadakan pertemuan dua kali dalam setahun dan akan membantu Implementator dengan membuat Guidelines, dan monitoring proses pengimplementasian. Secara struktural, PSC akan diketuai oleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau perwakilan dan anggotanya terdiri dari kementerian terkait, organisasi yang menjadi implementator dan Komisi Eropa. Program ini akan didanai oleh Komisi Eropa. Sementara Pemerintah akan berbentuk staff, dan juga kantor.

Total dana yang dibutuhkan untuk program ini adalah 12,317,000 juta USD. Hingga sekarang, Komisi Eropa telah bersedia untuk memberikan 11.25 juta USD, sementara 1,6 juta USD diharapkan akan dikontribusikan oleh Implementator. Total dana di atas akan digunakan untuk Monitoring dan auditing dan Grant murni.

Komisi Eropa harus memberikan prioritas kepada Pembangunan Area-area Rural, mengingat mayoritas rakyat Timor Leste hidup di area Rural. Ada baiknya jika, sektor Pertanian menjadi prioritas untuk ini, karena mayoritas masyarakat hidup dengan per-tanian. Tetapi belajar dari proyek-proyek yang sudah diimplementasikan sebelumnya, banyak program yang meskipun bertujuan untuk mem-berdayakan masyarakat lokal, tetapi dalam implementasinya tidak tercapai.

Hal ini dikarenakan masyarakat lokal tidak dilibatkakan dalam mengambil kebijakan. LH melihat bahwa pem-berdayaan masyarakat lokal tidak saja mencakup aspek ekonomi, tetapi juga harus dalam hal politik, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

LH juga berpendapat bahwa pemerintah Timor Leste harus dilibatkan secara aktif dan bukan hanya menjadi gorden semata. Pengalaman RDPI, menunjukkan bahwa ada program dimana Pe-merintah hanya menjalankan fungsi konsultatif. Sebaiknya ini dijadikan pengalaman untuk program RDP II. ❖

Laporan Tiga Bulan Pertama tentang Dana Perminyakan

Undang-Undang dana Perminyakan telah disahkan oleh Parlemen dan telah diumumkan oleh Presiden Republik, pada tanggal 3 Agustus 2005 melalui Jurnal da Republica dan dinyatakan mulai berlaku sehari kemudian (tanggal 4 Agustus 2005). UU dana Perminyakan memberikan mandat kepada *Bank Payment Authority* (Otoritas Perbankan dan Pembayaran) untuk menjalankan fungsi manajemen terhadap dana perminyakan. Pasal 13 UU perminyakan juga mewajibkan Otoritas Perbankan dan Pembayaran untuk memberikan laporan kepada publik setiap 3 bulan tentang kegiatannya.

Implementasi dari mandat ini adalah pada tanggal 18 November 2005, Otoritas Perbankan dan Pembayaran menyelenggarakan Konferensi Pers yang dihadiri oleh kalangan Pers dan LSM untuk menyampaikan laporan tentang perkembangan dari dana perminyakan ini. La'o Hamutuk mendapat kesempatan untuk menghadiri konferensi Pers ini. Artikel ini adalah *Summary* singkat dari laporan dana Perminyakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Perbankan dan Pembayaran tersebut.

Pemerintah mulai membuka rekening khusus untuk pendapatan dari Laut Timor sejak bulan Oktober tahun 2000 untuk pendapatan dari First Tranche Petroleum (FTP). Hingga tanggal 31 Agustus 2005, total pendapatan dari Laut Timor sebesar US\$ 79,555,667. Dari total ini, bunga yang diberikan oleh Otoritas Perbankan dan Pembayaran sebesar US\$1,114,115 dan kapitalnya sebesar US\$ 78,441,552.

Sejak tanggal 9 September, Pemerintah RDTL melakukan transfer dari rekening Timor Gap kepada rekening Petroleum Fund sebesar \$ 204,603,705. Jumlah ini dikategorikan sebagai berikut; Dari Account Timor Gap sebesar \$ 79,555,666 dan dari Dana Konsolidasi (Consolidated Fund for Timor Leste) sebesar 125,000,000. Hingga laporan untuk tiga bulan pertama dikeluarkan (tertanggal 30 September 2005), totalnya sebesar \$ 247,603,705. Meningkatnya angka ini dikarenakan penerimaan pajak dari Perusahaan yang beroperasi di Laut Timor sebesar \$ 43 juta untuk dua bulan pertama (Agustus dan September). Sementara bunga yang diperoleh sejak tanggal 9 September hingga tiga bulan pertama sebesar \$ 611,000. Informasi dari BPA pada tanggal 30 November 2005, jumlahnya sudah mencapai 346 juta USD.

Laporan ini dikeluarkan terlambat berdasarkan article 13 dari UU dana Perminyakan. Pasal ini mengatakan bahwa BPA harus memberikan laporan kepada Menteri Keuangan dan perencanaan nasional dalam 20 hari, dan harus mempublikasikannya dalam 40 hari, dihitung mulai dari tiga bulan pertama berakhir. Berdasarkan jadwalnya; quarter pertama berakhir pada tanggal 30 September dan Otoritas Perbankan dan Pembayaran sudah harus memberikan laporan pada tanggal 9 November. Tetapi ini baru terjadi pada tanggal 18 November, sehingga mengalami keterlambatan 10 hari. Menurut pihak Otoritas Pembayaran dan Perbankan, alasan keterlambatan dikarenakan ini merupakan laporan pertama,

maka terdapat hambatan dalam terjemahan. Tetapi pihaknya telah menyatakan komitmen untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh kerangka hukum yang ada.

Meskipun demikian, sebagai proses pertama, LH tetap menyambut baik dan berterima kasih atas usaha keras Otoritas Perbankan dan Pembayaran. Dan diharapkan agar laporan selanjutnya tidak akan mengalami keterlambatan yang sama. Menurut rencana, Otoritas Pembayaran dan Perbankan akan mempublikasikan laporan mengenai Dana Petroleum Fund secara tepat sesuai dengan hukum yang ada. Maka pada tahun 2006, laporan quarter pertama akan dipublikasikan pada tanggal 8 Februari, kemudian 9 Mei, kemudian 8 Agustus dan 8 November.

Persoalan Manajemen

Pasal 11 dari UU dana Perminyakan menjelaskan bahwa keputusan politik menyangkut manajemen berada di tangan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perencanaan Nasional dan Keuangan. Sementara fungsi operasionalnya dikendalikan oleh Otoritas Perbankan dan Pembayaran. Namun dalam hal pengambilan kebijakan tentang strategi investasi-, kementerian harus meminta nasehat dari Badan Penasehat Investmen yang hingga sekarang belum ditetapkan.

Selama tiga bulan pertama, nilai index Petroleum Fund mengalami penurunan 0.30% dari target yang diharapkan, sehingga dana perminyakan menurun 0.32% dari target yang diharapkan. Penurunan ini disebabkan oleh tiga alasan utama, diantaranya; pertama adalah Badai Katarina yang melanda Amerika Serikat, yang berdampak pada penurunan pada surat obligasi di pasar (US Bond). Kedua adalah komitmen dari Federal Reserve Bank (Bank dimana dana Perminyakan disimpan) untuk mengatasi laju inflasi, dan ketiga adalah Badai Rita yang melanda Amerika Serikat dan berdampak terhadap obligasi US.

Hingga sekarang, model manajemen yang digunakan oleh Pemerintah adalah manajemen pasif; Meskipun demikian, dana ini tetap digunakan untuk membeli dan menjual obligasi atas nama Pemerintah RDTL. Tujuannya adalah untuk mencapai bunga rata-rata yang dihitung berdasarkan index pasar. Kelebihan dari model ini adalah Timor Leste tidak akan mendapatkan bunga obligasi yang turun di bawah index pasar. Tetapi juga Timor Leste tidak akan memperoleh bunga obligasi yang tinggi di atas index pasar. Menurut beberapa pihak, keputusan ini adalah keputusan yang baik karena tidak terlalu berisiko tinggi, dan baik untuk rencana investasi jangka panjang.

La'o Hamutuk melihat bahwa laporan secara rutin oleh BPA akan membantu publik untuk mengikuti perkembangan tentang dana perminyakan dari laut Timor. Dan ini akan menghindari timbulnya kesalahpahaman dan dapat menghindari pengalaman buruk yang pernah dialami oleh negara-negara penghasil minyak lain. ❖

KELUARGA BESAR LA'O HAMUTUK MENGUCAPKAN
Selamat hari Natal Desember 2005
dan Tahun Baru Januari 2006



Kampanye 16 hari anti kekerasan

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tanggal 25 Nopember s/d 10 Desember 2005, dilakukan berbagai kegiatan kampanye anti kekerasan di Dili dan semua distrik di Timor Lorosae. Untuk tahun ini Tema dari kampanye 16 Hari anti kekerasan adalah "Untuk kesehatan wanita dan untuk kesehatan dunia : Hentikan Kekerasan ". Pembukaan kegiatan kampanye ini dilakukan di distrik Lospalos pada tgl 25 November dan akan ditutup di distrik Ermera pada tanggal 9 Desember 2005.

Kegiatan kampanye 16 hari tersebut diorganisir oleh : NGO Forum, Kantor Kesetaraan Gender, Unifem, UNFPA dan berbagai organisasi perempuan yang tergabung dalam Rede Feto, dengan dukungan dana dari UNIFEM, UNDP, UNFPA dan Caritas Australia.

Program kegiatan yang dilakukan selama 16 hari adalah workshop, Seminar, Quis, Talk show di TVTL dan Radio, Konferensi pers, Diskusi basis, Diskusi terbuka, Diskusi kelompok, Pelatihan dan pendidikan di Dili maupun ke-13 distrik.

Dengan berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang dampak dari kekerasan bagi kesehatan terutama bagi wanita. Sehingga adanya kesadaran dari masyarakat untuk menghentikan tindakan kekerasan.

Peluncuran Buku Tansa Mak Tenki Kuba

Tanggal 25 Nopember 2005, Dai Popular mengadakan peluncuran sebuah buku dengan judul “Tansa Mak Tenke Kuba.” Buku tersebut ditulis oleh 9 partisipan pertukaran studi Pendidikan Popular di Kuba. Kesembilan partisipan ini mewakili organisasi; Fokupers, AMKV, Naroman Bucoli, Fundasaun Haburas, Asosiasaun Hak, Fecu Uatu-Carbau, La’o Hamutuk dan Instituto Sahe ba Libertasaun.

Pada bulan Oktober-Nopember tahun 2003, Organisasi **La’o Hamutuk** bersama **Dai Popular** mengorganisir sebuah program pertukaran bersama **Centro Martin Luther King** di Kuba. Pertukaran ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada perwakilan Timor-Leste mendalami proses Pendidikan Popular di Kuba. Selama proses pertukaran ini Partisipan berkesempatan secara langsung bertemu dengan organisasi atau Institusi yang terkait dengan program pendidikan populer. Pengalaman dan informasi yang diperoleh oleh para partisipan diharapkan bisa menjadi sumber alternatif pembangunan bagi masyarakat di distrik dan di daerah pedesaan. Berdasarkan pada pemikiran tersebut maka para partisipan menulis dan meluncurkan buku ini sebagai sebuah referensi.

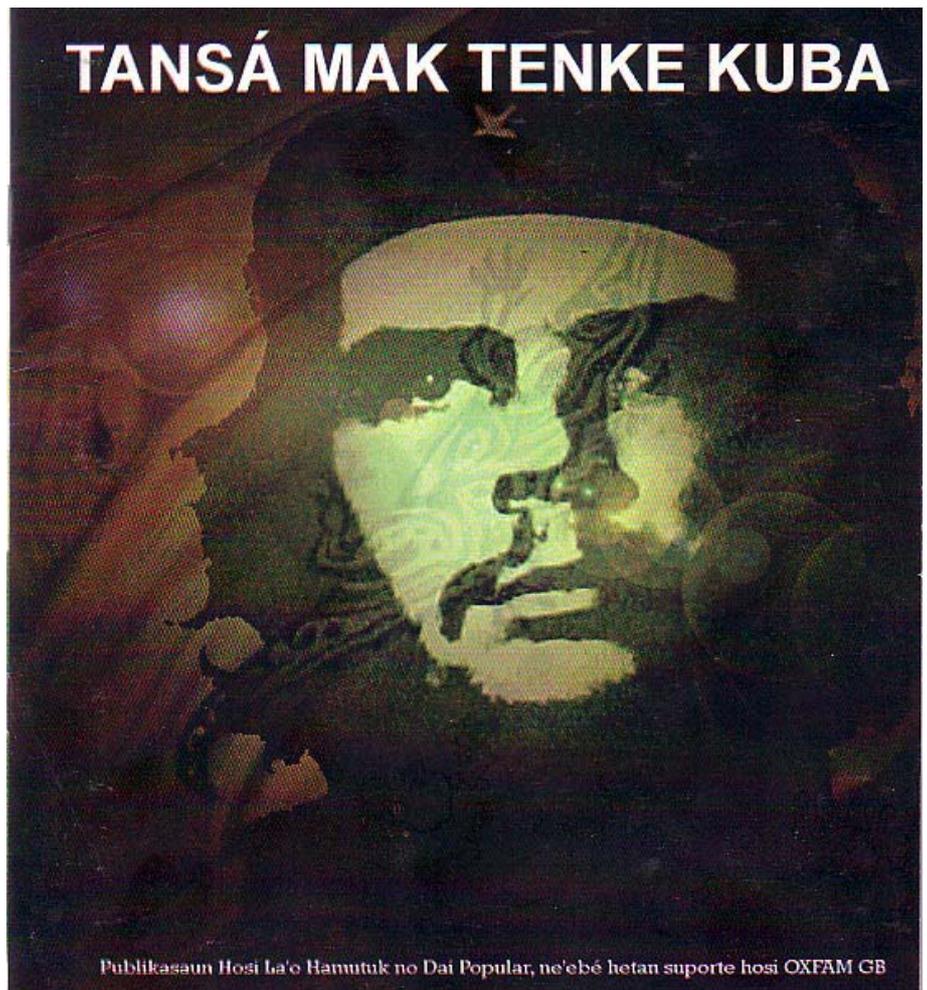
Dalam acara peluncuran buku tersebut, Sekretaris Negara Region II, Jose Manuel melalui pidatonya tentang “Peranan Pemuda dalam Pembangunan di era sekarang” mengatakan bahwa pemuda merupakan pilar dalam proses transformasi di negara mana saja dan sebagai pilar untuk mencapai tujuan pembebasan masyarakat dari manipulasi politik, eksploitasi dan kekerasan, partisipasi pemuda harus ditingkatkan di Negara Timor Lorosa’e.

Partisipasi pemuda dalam proses pembangunan masih membutuhkan kepemimpinan dan orientasi yang mantap guna mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Pemuda merupakan tulang punggung pembangunan oleh karena itu perlu adanya konsistensi keterlibatan pemuda yang pernah berjuang membebaskan Timor Leste ini dalam proses pembangunan yang tengah digalakkan sekarang ini.

Dr. Francisco (seorang dokter dari Kuba yang bertugas di Timor Leste) yang hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa Kuba adalah negara miskin seperti Timor Leste akan tetapi Kuba selalu ingin memberikan bantuan kepada negara-negara lain yang membutuhkan, ini bukan karena Kuba kelebihan atau kaya tetapi memberi bantuan berdasarkan

prinsip-prinsip solidaritas dan kemanusiaan. Sehingga Kuba telah menerima 227 orang pelajar Timor-Leste untuk belajar kedokteran di Kuba.

Nuno Rodrigues (Direktor Sahe ba Libertasaun) dalam pidatonya mengatakakan bahwa Cuba adalah contoh untuk semua Negara. Timor Leste sendiri harus mempelajari bagaimana bisa mengembangkan partisipasi Pendidikan



Popular pada era kemerdekaan ini. Timor Leste telah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan masyarakat Kuba. Nuno mengajak masyarakat Timor leste untuk memberikan solidaritasnya dan mensupport Kuba, karena sekarang Amerika Serikat masih memblokir Kuba, untuk bernegosiasi atau melobi dengan pemerintah Amerika Serikat agar mencabut kembali blokadanya.

Pada sore harinya, Instituto Sahe ba Libertasaun juga melakukan peluncuran buku mengenai “Francisco Borja da Costa (1946-1975), seorang musisi dan juga seorang pahlawan. Pada acara tersebut, istri Borja memberi kesaksian mengenai Borja dalam kontribusinya untuk membebaskan rakyat dan negara Timor Leste. Dan beberapa puisi yang ditulis oleh Borja dibacakan....

Workshop Jaringan

NGO Forum Timor Leste (FONGTIL) sebagai payung bagi NGO, bekerja sama dengan UNDP dan Oxfam memfasilitasi sebuah workshop bagi jaringan-jaringan, yang dilaksanakan pada tanggal 30 November – 2 Desember 2005 di Hotel Timor Lodge, Comoro.

Tapi sebelumnya FONGTIL telah melakukan beberapa tahap kegiatan antara lain pertemuan dengan jaringan dan assessmen kepada jaringan.

Hasil dari assessmen dipresentasikan pada workshop jaringan tersebut. Partisipan workshop tersebut berasal dari jaringan-jaringan yang ada di distrik dan Dili dengan jumlah peserta 23 orang yang berasal dari 14 jaringan (7 jaringan dari district dan 7 jaringan di Dili).

Tujuan dari workshop adalah :

1. Untuk menambah kapasitas organisasi payung/Forum untuk terlibat didalam jaringan di Timor Leste melalui diskusi, refleksi dan dukungan teknis.
2. Untuk memperkuat jaringan CSOs di Timor Leste agar dapat mengambil peranannya dalam mendukung dan memperkuat laki-laki dan perempuan di Timor Leste untuk secara aktif berpartisipasi di dalam proses pembangunan bangsa.
3. Untuk membangun kesadaran tentang bagaimana jaringan-jaringan di Timor Leste.
4. Bagaimana mengetahui hambatan-hambatan dan kesuksesan jaringan-jaringan yang ada di Timor-Leste.
5. Bagaimana menciptakan eksistensi FONGTIL untuk bekerja sama dengan jaringan di Timor Leste di masa yang datang.

Pada pasca 2000-an banyak jaringan yang mengalami hambatan dalam melaksanakan program kegiatannya disebabkan ketidakefektifan koordinasi anggota dalam jaringan dalam melakukan tugas dari isu yang diperjuangkan dan garis struktur kordinasi yang efisien sehingga berakibat fatal terhadap kapasitas jaringan dalam memperjuangkan isu kegiatan. Untuk memperbaiki ini maka semua jaringan lebih membahas bagaimana menciptakan jaringan yang ideal.

Melalui workshop ini juga telah diketahui tentang permasalahan dan kesuksesan yang dihadapi jaringan misalnya tidak adanya sekretariat, kurang dana untuk mendukung sekretariat, kurangnya koordinasi dan kerjasama anggota jaringan karena masing-masing anggota mempunyai kesibukan pada organisasinya masing-masing, kurangnya pengetahuan tentang manajemen sekretariat baik kegiatan maupun keuangan. Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh jaringan tersebut melalui hasil assessment jaringan yang dilakukan oleh FONGTIL, menunjukkan bahwa kedepan perlu memperhatikan sumberdaya sekretariat baik fasilitas kantor maupun kapasitas para pengelola jaringan.

Kegiatan yang diusulkan oleh beberapa anggota jaringan yang hadir yaitu perlu usaha keras dari jaringan itu sendiri untuk mengembangkan diri dan kegiatan-kegiatannya.

Sementara rekomendasi partisipan, agar kedepan FONGTIL bisa memfasilitasi peningkatan kapasitas jaringan seperti manajemen, investigasaun, monitoring, advokasi. Selain itu FONGTIL juga diharapkan dapat memfasilitasi koordinasi antara jaringan itu sendiri dan dapat mengadakan kerjasama dengan organisasi partner untuk melihat dan turut meningkatkan keberadaan jaringan kedepan.

Aksi 7 Desember

Untuk yang kesekian kalinya, dilakukan perayaan 7 Desember untuk mengenang hari invasi TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Timor Leste. Pada tahun ini, kegiatan 7 Desember diorganisir oleh ANTI (Aliansi Nasional ba Tribunal Internasional, atau Aliansi Nasional untuk Pengadilan Internasional).

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, berbagai organisasi, pemuda dan pelajar maupun keluarga korban yang tergabung dalam ANTI melakukan aksi damai dan mengeluarkan steatment/deklarasi bersama (yang dimuat pada halaman berikut dalam bulletin ini). Selain itu, dilakukan penaburan bunga di laut (depan Palacio Governo) dan peluncuran film dokumenter tentang kejahatan terhadap kemanusiaan “Rock n Roll with Jakarta” dan pementasan musik dan drama dari Gembel group di gedung Liceu.

Dalam orasi dan steatment mereka, tuntutan yang diteriakan oleh para demonstran ± 200 orang adalah “Inginkan Keadilan



bukan Impunitas”. Mereka tidak setuju dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KPK). Jalan satu-satunya untuk mencapai keadilan adalah Pengadilan Internasional.

ALIANSI NASIONAL TIMOR-LESTE BA TRIBUNAL INTERNASIONAL

(Timor-Leste National Alliance for an International Tribunal)

Sekretariadu: FONGTIL, Rua Caicoli, Dili Telemovel (+670) 725 4912, 727 8653

KONSPIRASAUN POLITIKA INVAZAUN SEI LA-HALUHA...!!

Tinan 30 liu ba iha loron 7 Desembro 1975, militar Indonesia invade Timor-Leste nebe hetan apoiu husi nasaun bo'ot sira hanesan Estadu Unidus amerika, Australia no seluk tan. Konspirasaun nasaun bo'ot sira ne'e hodi hamosu kedas violasaun graves direitus humanus ba povo iha rai Timor Leste. Timor oan hamutuk ema 200.000 mak deskunfia mate iha periodo invasaun ne'e no ema mate hamutuk 1.400 molok military Indonesia sai husi Timor Leste iha Tinan 1999. Durante tinan 24 anos, Timor Leste iha invazor Indonesia nia okos, povu tomak iha susar no mukit nia laran. Lakon nia vida moris no familia hodi liberta nasaun ne'e husi invazor Indonesia. To'o ikus htan duni nia independensia iha tinan 1999 liu husi elisaun popular mak fasilita husi UNO rasik.

Ohin loron 7 desembro 2005 hamutuk ba tinan lima (5) ona ita komemora loron invasaun ida ne'e. Problema barak mak rai doben no Povo Timor Leste ida ne'e infrenta, maibe ami fiar katak povo sei la-haluha saida mak akontese iha tinan 30 liu ba. Esperensia nebe'e povo ida ne'e hetan iha tinan 24 nia laran sei sai lisan ida ba ema hotu, liu-liu ba ema no nasaun sira nebe'e kaer politik hodi justifika violasaun direitus humanus. Povo rai ki'ik ida ne'e sei hatudu nafatin nia luta ba justisa ho nia konsensia rasik sei luta nafatin hodi kombate politika sira nebe'e kontra prinsipu direitus humanus nebe'e sai tiha ona iha Lei Internasional.

Ho matebian sira nia naran nebe'e mate iha tinan 24 nia laran hodi defende rai ida ne'e, ami sei hakilar nafatin ba justisa. Ukun an sei la-kompletu sei ita haluha tiha deit baut nebe'e ita uluk hakilar Hamutuk "Lori Autor Krime sira ba Tribunal Internasional...!!". Keta fo tan fatin ba konspirasaun sira hanesan ne'e atu akontese tan.

Tanba ne'e, nudar sosiedade sivil mak haknaar an iha Aliansi Nasional Timor Leste ba Tribunal Internasional nebe'e kompostu husi ONG nasional no Internasional, Familia Vitima no vitima, individu no universitariu nebe'e mak iha interese bot atu Luta ba Justisa iha rai laran; sei lembra fila fali iha loron historiku matebian sira, ho deklarasaun hirak mak tuir mai ne'e :

1. Lider nasaun Timor-Leste tenke promove no-mos tau substansia justisa iha nia fatin lo-los. Laos dezenvolve institusoens bar-barak nebe'e atu koko haluha justisa no gasta povu nia osan deit, hanesan Komisaun Verdade no Amizade.
2. ONU no comunidade internasional tenke iha responsabilidade ba krime graves direitus humanus iha Timor Leste hodi prevene no hakotu violasaun direitus humanus sira hanesan iha futuro.
3. Comunidade internasional tenke hakribi hahalok konspirasaun sira hanesan ne'e hodi labele halo politika violasaun direitus humanus iha futuro.
4. Ba nasaun bo'ot sira nebe'e suporta invasaun Indonesia nian iha 7 Desembro atu keta taka matan tan ba vitima sira nia ejjensia ba justisa, maybe to'o tempu ona atu tao matan no hakribi salan sira ne'e.

Ami espera katak, ho matebian no familia vitima sira mak agora da-daun namlekar lemo-lemo iha Timor-Leste... justisa sei sai realidade iha aban bain rua. Obrigado wain.

Dili, 7 Desembro 2005

Membrus Aliansi Nasional Timor Leste ba Tribunal Internasional

Berdasarkan pada pidato Bapak Presiden RDTL, Kayrala Xanana Gusmao di Parlemen Nasional dan berbagai steatmen yang dipublikasikan oleh berbagai media, mengenai Laporan CAVR akan ada kemungkinan disensor, terutama rekomendasi-rekomendasinya, maka Aliansi Nasional untuk Pengadilan Internasional memberikan tanggapan sebagai berikut.

Aliansa Nasional untuk Pengadilan Internasional

Yang Terhormat Bapak Presiden,

Kami menulis kepada Bapak sehubungan dengan kontroversi sekitar laporan CAVR yang baru-baru ini dikeluarkan.

Kami mengikuti perkembangan laporan ini dan kekuatiran terhadap berbagai laporan, termasuk pidato Bapak kepada Parlemen Nasional pada tanggal 28 Nopember, yang menyarankan bahwa ada kemungkinan untuk menyensor laporan tersebut, khususnya berhubungan dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Kami juga sangat menguatirkan keinginan Bapak untuk membatasi akses pada laporan tersebut.

Sebagaimana yang telah Bapak sampaikan kepada Parlemen, setiap orang di Timor Leste mengetahui sejarah yang dicantumkan dalam laporan CAVR. Kita tidak membutuhkan laporan ini untuk menjelaskan kepada kita tentang ribuan anggota keluarga dan tetangga kita yang meninggal sejak tahun 1975-1999. Bagaimanapun, laporan ini memberikan pengakuan resmi yang sangat penting mengenai pengalaman dan penderitaan dari perjuangan kita. Sebagai tambahan, rekomendasi-rekomendasi ekstensif dapat membantu kita sebagai manusia dan sebagai negara untuk menemukan jalan ke depan kendatipun adanya kekerasan dan sejarah opresif.

Kami yakin bahwa korban dan seluruh masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara utuh penemuan yang ditemukan oleh komisi, termasuk rekomendasi-rekomendasinya. Selama proses kerja CAVR, seluruh lapisan masyarakat di negeri ini, khususnya para korban, telah menunjukkan keberanian mereka dengan memberikan fakta melalui kesaksian mereka, seringkali kesaksian mengusik kembali kenangan mereka yang sangat menyedihkan. Keikutsertaan mereka dengan sebuah pengertian bahwa kesaksian mereka akan menyumbangkan proses yang berarti dan bertanggung jawab akan keadilan di Timor-Leste.

Kami percaya bahwa sebuah pengertian yang utuh tentang kebenaran sangat penting untuk rekonsiliasi dan keadilan. Walaupun kita semua tahu apa yang bakal terjadi sehubungan dengan prespektif korban, kita mengerti bahwa laporan CAVR juga menjelaskan kebijakan-kebijakan dan strategis-strategis yang mengakibatkan penderitaan, demikian juga peranan para aktor internasional. Jika masyarakat Timor Leste menginginkan hidup dalam kedamaian dengan tetangga mereka di Indonesia dan di seluruh dunia, maka informasi ini akan sangat membantu kita keluar dari kekerasan masa lalu menuju pada masa depan yang damai.

Kami mengerti bahwa regulasi dalam pembentukan CAVR (UNTAET/REG/2001/10) memberi provisi-provisi bebas kepada masyarakat untuk mengakses isi laporan.

Kami ingin mengingatkan Bapak bahwa tidak ada yurisdiksi untuk badan politik manapun termasuk Presiden untuk bisa mencegah proses penyebarluasan laporan tersebut.

Oleh karena itu, kami meminta dengan sangat kepada Bapak untuk menyebarluaskan laporan tersebut seluas-luasnya bila memungkinkan, dalam semua bahasa yang tersedia. Kami khususnya sangat berharap bahwa versi dalam bahasa tetum akan disediakan, sebagai tambahan pada penerjemahan bahasa Indonesia, Inggris dan Portugis

Tanda tangan

Editorial: Tragedi yang terlupakan (sambungan dari halaman 16)

sarana dan prasarana di Timor-Leste, lebih dari 200,000 penduduk yang secara paksa dipindahkan, pembunuhan massal serta ragam kejahatan pelanggaran HAM. Semua ini dilakukan oleh Milisi yang dibentuk oleh Jakarta dengan sokongan dana dari Bank Dunia yang nota bene digunakan untuk Jaring Pengaman Sosial di Indonesia. Ini adalah penyalahgunaan. Pemerintah Indonesia salah menggunakan dana dari Bank Dunia untuk mendukung kampanye pro-Otonomi.

Kini, tepatnya 30 tahun setelah invasi, rakyat Timor-Leste melihat serangan Invasi sebagai kaledoskop ketidakadilan di Timor-Leste. Masyarakat Timor-Leste kini sekali lagi meminta kesadaran kemanusiaan secara global, bagi mereka yang memimpikan keadilan untuk mewujudkan bentuk ketidak-adilan menjadi keadilan. Tentu saja, sejarah masa lalu tidak dapat dikembalikan. Tetapi merefleksikan kembali masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik dan adil merupakan kesamaan tingkatan yang sangat penting. Harapan ini bukan saja keadilan bagi Timor-Leste namun di seluruh dunia.

Tanggal 7 Desember, 1975 menandakan awal sebuah pendudukan yang panjang dan dipersulit oleh kompleksitas internasional dalam masalah ini.

Sekarang, Timor-Leste telah memenangkan kemerdekaannya dari penjajahan. Namun satu format legitimasi kemerdekaan belum dicapai-restorasi integritas para korban. Beragam upaya yang dilakukan hingga hari ini gagal – Ad hoc Jakarta dan spesial panel atas kejahatan berat belum

menemukan tuntutan legal keadilan bagi korban. Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) telah menyerahkan laporannya kepada presiden RDTL. Hal ini menjadi jelas bahwa pemimpin perlawanan yang selama masa pendudukan memperjuangkan keadilan memandang rekomendasi dari laporan sebagai ‘idealisme muluk.’

Banyak proses legal diadakan di Indonesia dan Timor-Leste, khususnya pengadilan Ad hoc di Jakarta dan pembentukan baru Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang bertujuan untuk melayani kepentingan kedua pemerintah dimana aspirasi dan tuntutan rakyat atas keadilan jelas diremehkan. Proses lainnya dilaksanakan dengan kepercayaan bahwa substansi keadilan dan tanggungjawab dapat dicapai, apabila didukung oleh proses politik dan individu-individu.

Pertanggungjawaban pelaku kejahatan kemanusiaan dan kekerasan atas hak asasi lainnya di Timor-Leste masih jauh dari kenyataan. Tuntutan korban kejahatan perang dan kekerasan hak asasi masih sulit dikekang. Namun tanggapan pemerintah kedua negara adalah pembentukan komisi kebenaran dan persahabatan, yang mana bertentangan dengan prinsip legal internasional. Dengan perayaan hari invasi atas Timor-Leste, sekali lagi korban meminta kepada masyarakat internasional untuk bergabung dalam aspirasi korban untuk menuntut pembentukan sebuah pengadilan internasional untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap hak asasi manusia diawali hari pertama invasi 1975 hingga 1999. ❖

La'õ Hamutuk buka staff foun!

Ami buka aktivista ema Timor oan nain rua atu hola parte iha ami nia tim nudar peskizador no halo servisu finansas.

Staf La'õ Hamutuk servisu kolaborativu ho staf seluk atu halo peskizador no relatoriu konaba aktividade instituisaun-instituisaun internasional iha Timor-Leste. Staff ida-ida fahe responsabilidade iha administrasaun no programa, inklui publikasaun Bulletin no surat popular, Programa Radio, Enkontru-enkontru publik, advokasia, educasaun popular no koalisaun.

QUALIFIKASAUN :

Peskizador : Iha esperiensi halo peskiza, iha matenek konaba buka informasaun no hakerek, Iha responsabilidade no komitmentu servisu, iha esperiensi ho solidariedade internasional, iha abilidade konaba komputador no hatene koalia ingles no portugues.

Servisu Finansas : Iha esperiensi servisu finansas ± tinan 2, esperiensi halo lobby no reportazem ba doador, iha responsabilidade no komitmentu servisu no bele koalia no hakerek iha ingles.

Informasaun tan kona ba La'õ Hamutuk no pozisaun sira, bele mai ami nia kantor iha Dili-Farol (besik kantor Asosiasaun Hak) ka bele mos haruka email mai laohamutuk@easttimor.minihub.org.

Se mak iha interese bele haruka : Karta Aplikasaun nebe'e eksplika tanba sa hakarak servisu ho La'õ Hamutuk, CV no referensia, hakerek articlo ida konaba Dezenvolvmentu ka Rekonstrusaun iha Timor Leste **mai kantor La'õ Hamutuk ka mai ami nia email.**

Deadline ba hatama aplikasaun to'õ 20 Janeiro 2006

Editorial: Tragedi yang terlupakan



Hingga tahun 1999, setelah lebih dari 200.000 jiwa tewas baru mengakhiri masalah di Timor Leste.

Invasi militer Indonesia di Timor-Leste merupakan tanggungjawab komunitas internasional yang sengaja menutup mata bahkan mendukung kelangsungan proses invasi dan pendudukan Indonesia di Timor-Leste selama 24 tahun. Dukungan militer, diplomatik serta ekonomi kepada Indonesia merupakan tanda persetujuan komunitas internasional atas tindakan brutalitas tentara Indonesia dan membantu pendudukan rezim militer Indonesia atas rakyat Timor-Leste dan wilayahnya.

Puncak dari perjuangan untuk kemerdekaan adalah referendum yang diselenggarakan oleh PBB pada tahun 1999, dimana lebih dari 79,8 % rakyat Timor-Leste memilih untuk kemerdekaan. Namun harga yang dibayar juga mahal, dengan kehancuran lebih dari 75%

(Bersambung ke halaman 15)

Tanggal 7 Desember 1975, merupakan awal tragedi bagi rakyat Timor Leste oleh militer Indonesia. Pada hari tersebut, Timor Leste telah diinvasi melalui darat, laut dan udara dengan menggunakan peralatan perang yang dibeli dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Diperkirakan 60 ribu orang telah meninggal selama tiga bulan masa pendudukan pertama-mungkin saja laporan CAVR akan memberikan kejelasan bahwa korban jiwa tidak mencapai angka tersebut.

Sehari sebelum invasi, Mantan Presiden Amerika Serikat, Gerard Ford dan Sekretaris Negara, Henry Kissinger mengadakan sebuah pertemuan dengan mantan presiden Indonesia, Suharto. Menurut laporan dokumentasi dari National Security Archive (NSA), yang dipublikasikan pada tahun 2001 mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Ford memberikan lampu hijau atas aksi invasi di Timor Leste.

Invasi tersebut dilakukan dengan dukungan negara-negara barat. Amerika Serikat yang waktu itu sedang kalah pada perang di Vietnam, melakukan upaya untuk memerangi komunis. Presiden Ford dan Kissinger menyetujui invasi tersebut karena mereka melihat bahwa di rezim Soeharto ada ketaatan terhadap strategi. Pada saat yang bersamaan, Australia secara aktif mengejar cadangan minyak dan gas yang ada di Laut Timor dengan Indonesia-mendukung serangan di Timor Leste dengan alasan yang sama dengan Amerika Serikat. Jadi invasi militer Indonesia ke Timor-Leste adalah kombinasi dari ambisi teritorial, kepentingan geopolitik dan geostrategis serta kepentingan ekonomi.

Dua minggu kemudian setelah invansi, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pertama yang meminta kepada Indonesia untuk menghormati integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste. Resolusi juga meminta menarik kembali militer-nya dari Timor-Leste. Resolusi ini juga meminta kepada Pemerintah Portugal untuk bekerjasama dengan PBB demi melakukan proses menuju penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste. Namun resolusi ini tidak bergigih, dan pendudukan militer tetap berlanjut. Hal yang sama terjadi pada berbagai resolusi yang dikeluarkan. sehubungan dengan masalah Timor-Leste.

Apa itu La'o Hamutuk?

La'o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi di Timor-Leste yang memantau, menganalisis, dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor-Leste dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor-Leste harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor-Leste yang efektif. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor-Leste. Staf *La'o Hamutuk* baik itu staf Timor-Leste maupun internasional mempunyai tanggungjawab dan memperoleh gaji yang sama. Terakhir, *La'o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Leste dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

La'o Hamutuk mempersilakan kepada mereka yang ingin menyalin kembali buletin atau foto yang ada dalam buletin dengan gratis. Buletin dan foto yang disalin harus tetap mencantumkan nama *La'o Hamutuk* sebagai sumber utamanya.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La'o Hamutuk mengharapkan anda menghubungi kami jika mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat Timor-Leste serta masyarakat internasional.